

## STRATEGI KESULTANAN BULUNGAN DALAM UPAYA MENDUKUNG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI KALIMANTAN TIMUR 1945-1950

**MENTARI**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
E-Mail: [mentarifaruq@gmail.com](mailto:mentarifaruq@gmail.com)

**Wisnu**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya

### Abstrak

Berita tentang kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah sampai di pemerintahan kesultanan Bulungan. Akan tetapi kesultanan Bulungan tidak bisa menentukan sikap, sebab segala bentuk keamanan baik sipil maupun militer telah dikuasai oleh NICA (Belanda). Pihak Belanda kembali menanamkan pengaruh kekuasaannya di wilayah Kesultanan Bulungan. Adapun upaya dari pihak NICA (Belanda) untuk menandingi negara Republik Indonesia dengan membentuk suatu bentuk tatanan pemerintahan baru yakni berbentuk federal yang terdiri atas wilayah Kalimantan dan Timur Besar bernama RIS (Republik Indonesia Serikat).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Mengapa Sultan Bulungan lebih memilih bergabung dengan pihak Republik Indonesia dibandingkan pihak Belanda dan bagaimana strategi kebijakan politik Sultan Bulungan terhadap pemerintah RI dan pemerintah Belanda. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan alasan mengapa Sultan Bulungan lebih memilih bergabung dengan Pemerintah RI dibandingkan pihak Belanda dan menjelaskan bagaimana strategi kebijakan politik yang diambil Sultan Bulungan terhadap pemerintah RI dan Belanda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yaitu, heuristik, kritik sumber, Interpretasi dan historiografi.

Hasil penelitian yang dapat diperoleh adalah Kesultanan Bulungan memutuskan berpihak kepada RI sebab sikap kesewenang-wenangan Belanda dalam setiap pengambilan kebijakan lebih banyak merugikan Kesultanan Bulungan. Pungutan pajak memberatkan masyarakat, hingga menimbulkan pergolakan sebagai bentuk protes terhadap Belanda. Sehingga pada masa mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang membentuk negara federal, pada periode tahun 1945-1949 Sultan mengambil langkah politik Diplomasi dan Politik Bermuka Dua terhadap pemerintah RI dan Belanda, yang pada akhirnya politik tersebut berhasil menghantarkan Kesultanan Bulungan pada keputusan mendukung Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dilangsungkannya upacara kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1949 dan dikibarkannya bendera Merah Putih di depan halaman istana dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Kesultanan Bulungan.

**Kata kunci: Kesultanan Bulungan, Politik, Strategi**

### Abstract

*The news of Indonesian Independence in 17th August 1945 has reached to The Sultanate of Bulungan. However, the Sultanate couldnt take action because the civil-military security was undercontrol by NICA. The dutch tried to defend its power in Indonesia by making a new structural government. A federal state for Indonesia, called RIS, was created and undercontrol by Dutch Government. This federal state were composed of Kalimantan and the Great East.*

*This research was proposed to find out (1) Why did the sultanate of Bulungan choose to be with Republic Indonesia than the Dutch government ? (2) how was the political strategy of Sultanate of Bulungan towards the RI government and the Dutch Government?. This research used historical method with four steps. The steps are heuristics, source criticism, and historiography.*

*The result shows that the sultanate of Bulungan stood on RI because the Dutch government was arbitrary. The dutch government collected incriminating tax and caused upheaval. In 1945-1949, the Sultanate took a political diplomacy and political move of dual face to RI and Dutch. This political move delivered the Sultanate stood on RI. This was proved by the holding the independence ceremony on August 17, 1949 and raising flag. This ceremony was attended by the Sultanate and people of the Sultanate of Bulungan.*

**Key Words: The Sultanate of Bulungan, Politic, Strategy**

## PENDAHULUAN

Pasca proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945, bangsa Indonesia masih saja belum terlepas dari berbagai macam gangguan, baik gangguan datangnya dari dalam maupun dari luar. Pada tanggal 14 juli 1946 pihak sekutu menyerahkan urusan keamanan daerah di luar Jawa dan Sumatera kepada pihak Belanda, dengan segera keesokan harinya Van Mook melangsungkan suatu konferensi di Malino (Sulawesi selatan) yang dilaksanakan pada tanggal 15-25 Juli 1946, konferensi tersebut dipimpin langsung oleh Van Mook dan dihadiri oleh 36 utusan yang terdiri atas : Kalimantan Barat 3 orang, Kalimantan Timur 3 orang, Kalimantan Selatan 4 orang, Bangka Belitung 2 orang, Riau 1 orang, Sulawesi Selatan 4 orang, Minahasa 2 orang, Manado 2 orang, Bali 2 orang, Lombok 2 orang, Timor 3 orang, Sangihe-Talaud 1 orang, Maluku Utara 2 orang, Maluku Selatan 4 orang dan Papua 1 orang.<sup>1</sup> Tujuan diadakannya konferensi ini untuk menyusun daerah-daerah diluar wilayah *de facto* RI dibawah pengaruh kekuasaan Belanda agar Belanda dapat ikut serta di dalam pembicaraan politik dalam tertib hukum baru dan ketatanegaraan baru di Indonesia. Konferensi Malino berpendapat bahwa Negara Indonesia Serikat yang akan dibentuk akan terdiri dari Jawa, Sumatera, Timur Besar dan Kalimantan dengan suatu syarat bahwa mengingat keputusan-keputusan yang diambil di daerah-daerah yang bersangkutan dan mandat wakil-wakil daerah itu akan dirundingkan lagi hal-hal sebagai berikut : (1) Pemasukan Sunda Kecil dalam wilayah kekuasaan Timur Besar atau pembagian Sunda Kecil menjadi bagian-bagian tersendiri faderasi itu sendiri ; (2) Pemasukan swapraja di Kalimantan Timur dalam Negara Kalimantan. Sambil menunggu pemasukan Daerah Bangka, Riau dan Belitung ke dalam wilayah Sumatera, ketiga daerah ini akan disusun menjadi daerah-daerah otonomi dan mendesak agar diadakan tindakan untuk memajukan taraf perkembangan penghidupan rakyatnya.<sup>2</sup>

Kesultanan Bulungan yang merupakan suatu kerajaan yang telah memiliki susunan administrasi pemerintahan baik pada masa itu, turut dilibatkan dalam jalannya konferensi konferensi dengan mengirimkan salah satu wakil terbaiknya untuk bersama-sama mewakili wilayah Kalimantan Timur untuk menghadiri konferensi Malino.

Sultan Djalalluddin dengan memberi penghargaan pangkat tertinggi dari Ratu Wihelmina dengan maksud agar nantinya sultan yang memerintah mau bekerja sama dan pro terhadap rencana-rencana yang

akan dilakukan Belanda demi kepentingannya. Meski menerima gelar tersebut, namun sultan Bulungan tidak sepenuh hati menerima kembalinya Belanda ke wilayah kesultanan Bulungan, mengingat pada masa silam para sultan terdahulu pemerintahannya lebih banyak dirugikan oleh pihak Belanda, terlebih lagi jika sultan yang memerintah tidak mau berkerja sama. Belanda tidak kehabisan akal, dengan berbagai upaya Belanda ingin kembali menanamkan pengaruhnya dan merubah sistem pemerintahan dari kesatuan menjadi bentuk federal. Pembentukan federasi yang digagas oleh Pemerintah Belanda ini diwakili oleh Gubernur Jenderal Van Mook, dan berusaha menggalang dukungan dari daerah-daerah yang tidak berada di bawah kekuasaan *de facto* Republik Indonesia. Tanpa diketahui oleh pihak Belanda, Kesultanan Bulungan ternyata sangat aktif menggalang dukungan pada pihak Republik Indonesia melalui serangkaian pertemuan secara rahasia yang dilakukan oleh utusan beliau Datuk Bendahara Paduka Raja beserta golongan-golongan yang *pro* terhadap Republik Indonesia. Hal tersebut menarik penulis untuk melakukan penelusuran berkenaan dengan strategi yang dilakukan oleh Kesultanan Bulungan dalam mendukung Kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Timur pada tahun 1945 hingga tahun 1950.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Guna mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti, penulis menggunakan metode penulisan sejarah. Adapun tahapan penulisan ini dimulai berdasarkan tahap-tahap, antara lain : tahap Heuristik, tahap Kritik, interpretasi, dan Historiografi.<sup>3</sup>

Pada tahap *pertama* (*heuristik*) Pada tahap awal ini, penulis mengumpulkan sumber-sumber yang terkait dengan Strategi Kesultanan Bulungan Dalam Upaya Mendukung Kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Timur Tahun 1945 -1950 yang ada keterkaitannya dengan pembentukan negara-negara federal bentuk Belanda yaitu Republik Indonesia Serikat (RIS).<sup>4</sup> Buku-buku yang berkenaan dengan tema diperoleh dari perpustakaan Nasional Indonesia, perpustakaan Kabupaten Bulungan, dan perpustakaan Universitas Negeri Surabaya. A) Sumber Primer : Arsip kontrak politik antara Sultan Bulungan dengan Belanda dan dokumentasi berupa foto yang berkaitan dengan peristiwa dukungan Sultan Terhadap Republik Indonesia. B) Sumber Sekunder : Koran-koran terbitan seaman

<sup>1</sup> Osman Raliby, *Documenta Historica*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1953), hlm. 351, dalam Suparwoto dan Sugiarti, *Sejarah Indonesia Baru*, (Surabaya: University Press IKIP Surabaya, 1997), hlm.64.

<sup>2</sup> Ida Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985), hlm. 114.

<sup>3</sup> Aminudin Kasdi, *Memahami Sejarah* (Surabaya : University Press, 2001), hlm.11

<sup>4</sup> Penulis mengalami kesulitan dalam penelusuran sumber sejarah Kesultanan Bulungan, segala bentuk peninggalan baik bangunan Istana, benda-benda maupun manuskrip arsip milik Kesultanan Bulungan habis dibakar. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 24 Juli 1964 yang dikenal peristiwa Bultiken.



yakni Pelita Rakjat yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional, buku-buku yang relevan salah satunya karya Ida Anak Agung Gde Agung, buku Moeis Hasan serta buku-buku sejarah lokal yang memuat peristiwa-peristiwa sejarah Kesultanan Bulungan sebagai penunjang penulisan, serta metode wawancara.

Setelah sumber-sumber terkumpul, tahapan *kedua* pada tahap kritik sumber, penulis melakukan verifikasi untuk menguji validitas sumber-sumber yang telah sebelumnya diperoleh melalui penelusuran yang dilakukan penulis. Penelusuran sumber yang berkaitan judul tersebut menghasilkan beberapa data sejarah yang menguatkan penulisan ini, seperti dokumentasi foto-foto pelaku peristiwa, surat kabar sejaman, serta hasil wawancara narasumber sebagai pendukung dalam menguji validitas sumber yang diperoleh oleh penulis dalam upaya penulisan sejarah tentang strategi Kesultanan Bulungan dalam upaya mendukung kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Timur 1945-1950.

Setelah dilakukan kritik terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh maka selanjutnya dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap fakta-fakta tersebut. Setelah semua fakta dan data sejarah terkumpul dan disusun dengan berurutan. Penulis dapat memperoleh makna-makna yang saling berkaitan dari fakta-fakta yang diperoleh mengenai peristiwa strategi Kesultanan Bulungan dalam upaya mendukung kemerdekaan Republik Indonesia.

Tahap akhir dari penelitian ini sejarah adalah historiografi, pada tahapan ini peneliti melakukan penulisan sejarah secara kronologi, dimulai dengan lahirnya suku Bulungan dan membentuk pemerintahan hingga masuknya kolonialisme Belanda sampai pada akhirnya Kesultanan Bulungan menentukan sikap dan mendukung Republik Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Kesultanan Bulungan

#### 1. Suku Bulungan

Dari legenda yang diceritakan secara turun temurun dalam masyarakat suku Bulungan, asal muasal lahirnya suku Bulungan ini hingga membentuk suatu pemerintahan yaitu berawal dari suatu legenda yang berkembang di Bulungan bahwa suku Bulungan berasal dari Bambu dan Telur. Legenda ini berawal dari kisah seorang kepala suku kayan yang bernama Kuanyi, ia merupakan seorang pemimpin adat dikawasan sungai (Long) Payang anak sungai Pujungan. Kuwanyi hidup berdua saja dengan sang istri tanpa seorang anak. Keesokan harinya saat Kuwanyi dan istrinya

terbangun, mereka terkejut karena mendengar suara tangisan bayi dari arah dapur rumahnya.

Dengan segera mereka berdua menghampiri ke arah suara bayi berasal, alangkah terkejutnya suami istri itu karena suara tersebut ternyata berasal dari bambu dan telur yang ia bawa kemarin. Setelah diamati lebih dekat suara itu berasal dari sepasang bayi laki-laki dan perempuan. Peristiwa aneh yang dialami kedua pasangan suami istri itu diceritakanlah kepada masyarakat setempat, dan oleh masyarakat peristiwa penemuan kedua bayi ini disebut dinamakan Bulungan (Bambu dan telur), yang pada perkembangannya menjadi Bulungan. adapun versi lainnya kata Bulungan ini berasal dari kata Bulu (bambu) dan Tengon ( Sungguhan).

### b. Kondisi Sosial Masyarakat Suku Bulungan

Penduduk asli Bulungan terdiri dari suku-suku bangsa yang sudah lama mendiami daerah Bulungan. berdasarkan cerita turun temurun penduduk asli suku Bulungan adalah suku bangsa Tidung yang merupakan campuran dari orang Brunei, Filipina dan penduduk asli Bulungan. Penduduk di ibukota pemerintahan Bulungan terdiri dari bangsawan dan orang-orang kecil.

Masyarakat kesultanan Bulungan rata-rata bermatapencaharian sebagai nelayan dan petani, hal ini didukung kondisi geografis wilayah Kesultanan Bulungan yang cukup baik. Kekayaan flora dan fauna serta letak wilayah yang strategis memudahkan masyarakatnya mencari penghidupan. Garis strata sosial Bulungan terdiri dari tingkat-tingkat sebagai berikut: Tertinggi di bawah sultan adalah "Datu". Hanya keturunan sultan yang bisa menjadi Datu. Jadi status sosial datu adalah adalah "*ascribed status*" atau status yang diperoleh karena kelahirannya atau hubungan darah dengan orangtuanya. Selanjutnya hanya keturunan Datu yang bisa menjadi Datu dan Sultan. Seorang perempuan keturunan Datu disebut "Aji." Jika seorang perempuan bangsawan (Aji) menikah dengan lelaki dari golongan non-bangsawan, maka keturunannya bukan bangsawan dan tentu saja tidak bisa menjadi Datu atau Aji.

Di bawah Datu ada "Pangeran" yang merupakan penasihat atau staf intisultan. Status Pangeran adalah "*assigned status*" atau status yang diperoleh karena penganugerahan dan pengangkatan oleh sultan. Jadi anak seorang pangeran belum tentu bergelar pangeran juga. Hanya sultan melalui perdana menteri, yang memiliki wewenang untuk mengangkat seorang pangeran. Selanjutnya pada tingkat sosial di bawah pangeran ada "Aji" dan "Andin". Aji juga sebutan untuk keturunan pangeran (laki-laki atau perempuan). Sedangkan Andin sebenarnya diadopsi dari gelar bangsawan Tidung dari Sembakung.

Pada masa pemerintahan Sultan Kasimuddin Kesultanan Bulungan mencapai puncak kejayaannya. Sejak dinobatkan, Sultan Kasimuddin mengambil langkah kebijakan politik dibidang ekonomi, antara lain memanfaatkan hasil hutan dan laut atau perikanan.<sup>5</sup> Tahun 1902 NV BPM (*Bataafsche Petroleum Maatschapij*) menemukan sumber minyak di Pulau Tarakan, sehingga kekayaan Kesultanan Bulungan semakin bertambah.

#### Gambar

**Kapal Transportasi Milik Belanda Untuk Berkunjung ke Kesultanan Bulungan (1915)**



Sumber : <http://www.zarkasyi.id/>, Diakses 3 Oktober 2016, Pukul 21.15 WIB

#### c. Latar Belakang Sikap Kesultanan Bulungan Berpiak Pada RI

##### 1. Kontrak Politik Yang Mengikat Kesultanan Bulungan dengan Belanda (1834-1911)

Sekitar 1800 kerajaan Berau yang bertetangga dengan Kesultanan Bulungan, ditakhlukan oleh Belanda. Setahun setelah penakhlukan Kerajaan Berau, Belanda masuk ke wilayah Kesultanan Bulungan. pada awalnya kedatangan mereka ingin meminta ijin untuk melakukan perdagangan dengan membangun sebuah pos di Tanjung Selor. Dimasa pemerintahan Sultan Muhammad Kaharuddin sempat terjadi perselisihan antara Kesultanan Bulungan dengan Kerajaan Kenyah dari hulu sungai Kayan. Hal ini kemudian dimanfaatkan pihak Belanda untuk menanamkan pengaruhnya pada pemerintah Kesultanan Bulungan.

Pihak yang paling menguntungkan bagi Belanda pada waktu itu ialah Kesultanan Bulungan, karena memiliki letak yang strategis. Pada peristiwa itu Kesultanan Bulungan menang, dibantu oleh pihak Belanda yang memiliki persenjataan lengkap dan lebih

modern dijamannya. Karena kemenangan diraih oleh kesultanan Bulungan, pemerintah Kesultanan harus membalas jasa Belanda yakni dengan menandatangani sebuah perjanjian sejak 27 September 1834, yang isinya secara garis besar bahwa Kesultanan Bulungan mengakui Belanda sebagai dipertuankan, dan kemudian dijamin seluruh wilayah Bulungan. Berikutnya ditandatangani pada 12 November 1850 dengan isi kontraknya bahwa Belanda membantu mengamankan raja dan istananya, akan tetapi kerajaan harus memberikan imbalan hasil yang diperlukan oleh Belanda.<sup>6</sup>

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa awal terjadinya suatu hubungan antara Kesultanan Bulungan dengan pihak Belanda terjadi setelah melakukan sebuah kontrak politik atau perjanjian. Konflik antara kerajaan tetangga menjadi sebuah celah bagi pemerintah Hindia Belanda, secara berturut-turut tahun 1850 pada masa Sultan Muhammad Kaharuddin Belanda mulai membangun sebuah pos di Tanjung Selor. Pada tanggal 12 November 1850 diadakanlah politik kontrak pertama.<sup>7</sup> Didalam kontraknya pihak Belanda tetap mengakui kedaulatan kerajaan-kerajaan tersebut dalam menjalankan pemerintahan diwilayahnya. Kontrak-kontrak yang dibuat Belanda dengan kerajaan-kerajaan tersebut dapat dibedakan menjadi *Long Contract* dan *Korte Veklaring*. Dalam *Long Contract* ditetapkan satu persatu kekuasaan Belanda yang ada hubungannya dengan kerajaan yang bersangkutan. Sedangkan dalam *Korte Veklaring* termuat pernyataan bahwa kerajaan-kerajaan mengakui kekuasaan Belanda dan mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.<sup>8</sup>

##### 2. Kesultanan Bulungan Kembali Ketangan Pihak Belanda

Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Muhammad Djalaluddin yang memerintah sejak tahun 1931, Sultan Djalaluddin merasakan pengalaman pahit akibat Perang Dunia II dan tiga kali mengalami tekanan yaitu, tekanan Belanda, Jepang, serta terbakarnya kilang minyak di Tarakan. Penggempuran oleh tentara Sekutu di Tarakan sudah berlangsung sebelum akhirnya Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945. Pada bulan Agustus 1945 tentara Sekutu yakni Australia langsung segera menyerang Pulau Tarakan untuk melucuti senjata Tentara Jepang dalam operasi pembebasan Tarakan yang bersandikan operasi *Obe One*.

<sup>6</sup> Said Karim, 2011, *op.cit.* hlm. 24.

<sup>7</sup> Panitia Sejarah Pemerintahan Kabupaten Bulungan, *op.cit.*, hlm. 63.

<sup>8</sup> Debdikbud, Sejarah Daerah DI Yogyakarta. (Jakarta : Depdikbud.1981), hlm.287-288.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Datu Berahim (60 Tahun) tanggal 9 September 2016



Belum sempat menentukan sikap atas informasi tentang proklamasi kemerdekaan RI, Sekutu yakni tentara Australia terlebih dahulu masuk ke wilayah Bulungan. Masuknya tentara Sekutu di wilayah Kesultanan Bulungan ternyata dimanfaatkan oleh pihak Belanda. Setelah masuk ke wilayah Kesultanan Bulungan, NICA (*Nederlands Indie Civil Administration*) memanfaatkan peluang ini untuk mempengaruhi Sultan agar mau bergabung dalam ketatangaraan baru sesuai konsep federasi yang diusulkan oleh Van Mook. Penguasa-penguasa kerajaan besar yang terdapat di wilayah diluar *de facto* Republik Indonesia di undang oleh Van Mook dalam sebuah pertemuan dan bersama-sama ikut serta untuk membicarakan rencana pembentukan negara federasi atau Negera Indonesia Serikat pada bulan Juli 1946.

Kesultanan Bulungan mengutus seorang menterinya yang bernama Datu Bendahara Paduka Raja untuk menghadiri pertemuan gagasan van Mook tersebut. Kembalinya Belanda ke Kesultanan Bulungan sebenarnya berat untuk diterima oleh Sultan Maulana Muhammad Djalaluddin mengingat beberapa kejadian buruk yang dialami pada masa pemimpin-pemimpin pendahulunya.

#### Gambar

**Raden Afloes Bersama Datu Mohammad Menghadiri Konferensi Malino (16-25 Juli 1946)**



Sumber: <http://media-kitlv.nl/>, Diakses 25 Oktober 2016, Pukul 19.05 WIB

#### d. Alasan Sikap Sultan Bulungan Berpihak Kepada RI

Kalangan yang nonkooperatif dengan pemerintah Belanda pada tanggal 5 Juni 1945 membentuk sebuah perkumpulan yang disebut Ikatan Nasional Indonesia (INI) di Balikpapan. Ketua umum dari perkumpulan INI adalah Aminuddin Nata, dan Mas Sarman sebagai Wakil ketua. Segera struktur

kepengurusan partai yang pro terhadap pemerintahan RI ini dibentuk. Sejak saat itu dengan cepat berdirilah cabang-cabang INI di luar Balikpapan seperti di Tarakan (Rasjid), Tanjung Redeb (M. Joesoef), Tenggarong (A.B. Djapri) dan Kota Bangun (A.B.M. Joesoef). Di Samarinda atas prakarsa Moeis Hassan cabang INI dibentuk pada tanggal 3 Desember 1946, menyusul kota-kota lainnya seperti Sanga-Sanga, Anggana, Sambodja, Tanjung Selor, Sangkulirang dan beberapa tempat pedalaman Kutai. Cepatnya perkembangan INI di Kalimantan Timur menimbulkan kekhawatiran pada pihak Belanda, kerana itu dengan segera mereka melakukan sebuah tindakan penangkapan secara beruntun terhadap para petinggi-petinggi partai INI.

Sementara itu untuk meredam suasana Kalimantan Timur dan daerah di luar *de facto* RI lainnya yang kurang kondusif, Belanda dengan segera mengambil langkah mengadakan sebuah Konferensi yang bertujuan membentuk suatu tatanegara baru yang berbentuk federal. Meski pergolakan penolakan terhadap pihak Belanda hampir terjadi di seluruh wilayah Kalimantan Timur, namun pihak Belanda dengan berbagai usahanya terus berusaha agar wakil-wakil dari kerajaan-kerajaan atau pemimpin yang berpengaruh di wilayahnya di undang dan turut hadir dalam konferensi tersebut untuk bersama membicarakan tentang tatanegara baru yang dapat berpengaruh pada perkembangan wilayah wakil-wakil tersebut. utusan yang diberangkatkan A.R Afloes, Datu Muhammad alias Datu Bendahara Paduka Raja, Sampan alias Zainuddin dan Raden Soeroto.<sup>9</sup>

Rakyat Kalimantan Timur yang secara terang-terangan memberi dukungannya terhadap pihak Unitaris yakni masyarakat Balikpapan, melalui Kepala Penjawatnya A.R Djojoprawiro pada tangga 11 November 1946 mengirimkan sebuah telegram kepada Perdana Menteri RI St.Syahrir. Telegram tersebut berisi pernyataan bahwa seluruh rakyat Balikpapan mendukung dan berdiri dibelakang Pemerintah RI dan menolak mengirimkan utusan ke Konperensi Denpasar. Sama halnya dengan sikap rakyat Balikpapan, sikap serupa pun di nyatakan Andi Syech Assegaff dari Pasir. Telegram tersebut mendapat jawaban P.M St.Syahrir ia menyampaikan rasa gembiranya dan terimakasih atas keputusan rakyat tersebut.

Pada tanggal 31 Mei 1947, INI mengadakan konferensi pertamanya di Balikpapan dan dihadiri sebagian cabang-cabangnya dalam konferensi tersebut INI tegas-tegas menolak pembentukan Negara Kalimantan dan menyatakan bahwa dalam menentukan nasib rakyat Kalimantan. Selanjutnya diadakan konferensi INI ke II pada bulan April 1948 yang

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm.69.

bertempat di Gedung Nasional. Konferensi INI ke II menetapkan sikap INI, sesudah adanya persetujuan Renville dan untuk menetapkan sikapnya terhadap pembentukan negara Kalimantan dan dewan-dewan daerah di Kalimantan. Seluruh cabang INI di Kalimantan Timur tidak ada yang ikut campur dengan pembentukan Negara Kalimantan dan dewan-dewan daerah.<sup>10</sup>

#### Gambar

#### Konferensi II Perkumpulan INI di Balikpapan (1948)



Sumber: <http://www.zarkasyi.id/> , Diakses 29 Oktober 2016, Pukul 10.30 WIB

Sikap perlawanan yang ditunjukan rakyat Kalimantan Timur terhadap NICA (Belanda) bukanlah suatu hal yang baru, jauh sebelum diproklamirkan Kemerdekaan dimana pemerintahan masih dikendalikan oleh Pemerintah Belanda perlawanan-perlawanan kecil pernah dilakukan. Perlawanan tersebut bukan tanpa alasan, sikap kesewenangan yang dilakukan Belanda yang sering memaksakan kehendaknya diluar dari norma-norma masyarakat setempat. Di wilayah administratif Kesultanan Bulungan Bulungan perlawanan terhadap pemerintahan Kolonial Belanda pernah dilakukan, namun konflik perlawanan segera mungkin dapat diredam kedua belah pihak.

Hubungan kesultanan Bulungan dengan pemerintah Hindia Belanda telah terjalin sejak kedatangan mereka menginjakkan kakinya di tanah Borneo. Pasang surut hubungan keduanya tidak dapat terelakan. Kedatangan pemerintah Hindia Belanda di Wilayah Kesultanan Bulungan saat Sultan dipimpin Aji Muhammad dimulai tahun 1817 dengan gelar Sultan Muhammad Kaharuddin. Tak lama berselang terjadi sebuah konflik antar kerajaan Bulungan dan Kenyah, dan Belanda memanfaatkan situasi ketegangan antar dua kerajaan ini. Melihat hal itu pihak Belanda dengan segera mengambil keuntungan dari situasi yang terjadi. Dengan memperhatikan kedua belah pihak, ditambah dengan

niatan awal ingin menancapkan pengaruhnya Belanda memilih pihak yang paling banyak menguntungkannya. Kesultanan Bulungan merupakan pihak yang menguntungkan bagi Belanda dengan segera Belanda menawarkan diri untuk membantu pihak Kesultanan Bulungan. Serdadu angkatan Belanda memberikan bantuan dengan menggunakan persenjataan yang lengkap dan. Kemenangan diraih oleh Kesultanan Bulungan, Untuk membalas budi Jasa kepada pihak Belanda, diadakanlah sebuah perjanjian tertulis antar kedua belah pihak. Sejak saat itulah secara resmi pemerintah Hindia Belanda menancapkan kekuasaannya pada Kesultanan Bulungan yang kelak berpengaruh dalam setiap pengambilan kebijakan.

Dimasa pemerintahan Datu Alam Putra Pangeran Maulana yang bergelar Sultan Khalifatul Alam Muhammad Adil (1873-1875) ia merupakan seorang ulama yang terkenal banyak pengikutnya serta senantiasa menentang kebijakan pemerintah Belanda atau bersikap nonkooperatif. Sultan menjalankan roda pemerintahannya dengan pendekatan keagamaan. Segala kebijakan dianggap melanggar perjanjian dengan Belanda, hal inilah yang menyebabkan Sultan tidak disenangi oleh Belanda. Kekuasaan pemerintahan beliau hanya mampu bertahan selama dua tahun saja (1873-1875) dan ia pun wafat dalam suatu jamuan.

Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda atas kebijakan yang dianggap merugikan serta memberatkan masyarakat terjadi pada masa pemerintahan Sultan Azimuddin yang bertahta sejak tahun 1889-1899. Terjadi perlawanan dari kawasan pedalaman. Perlawanan dipicu karena kebijakan pemerintah Belanda yang memungut pajak yang dirasa terlalu berat oleh masyarakat. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena sultan mengirim delegasi perdamaian yaitu Datu Mansyur untuk berdamai dan perdamaian pun disetujui.

Protes secara besar-besaran juga terjadi pada masa pemerintahan Sultan Kasimuddin (1901-1925). Pemicunya adalah kebijakan pajak Kolonial Belanda terhadap rakyat. Pada tahun 1909 meletus lagi perlawanan panglima Segai Wanpai Luhung, dalam hal ini militer Belanda KNIL (Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger) yang bermarkas di Tanjung Selor turun tangan memadamkan kemelut yang terjadi diawal pemerintahan Sultan Kasimuddin tersebut, dikirimlah sepasukan Ekspedisi kepedalaman dipimpin oleh Kaptein J. Cox, karena kalah persenjataan dan strategi, panglima Wanpai Luhung dan pasukannya pun ditakhlukan, beliau dan pengikutnya dikirim ke Nusakambangan.

Serangkaian Perlawanan terhadap kebijakan Kolonial Belanda akhirnya mulai bermunculan, separuh Tanah Tidung yaitu Malinau pun memproklamirkan melepaskan diri dari kesultanan Bulungan yang dikepalai

<sup>10</sup> *Pelita Rakjat*, 8 April 1948, hlm. 2



oleh mendiang Panembahan Maharaja Pandita, perlawananpun akhirnya dapat teratasi setelah pemerintah Kolonial Belanda mengirim pasukan ekspedisi memasuki pusat perlawanan mendiang Panembahan Maharaja Pandita dan berhasil menangkap beliau dan parapengikutnya, pada akhirnya mereka dikirim pula ke Nusa Kambangan.<sup>11</sup>

Masuknya pengaruh Belanda dalam sendi pemerintah Kesultanan Bulungan sangat mempengaruhi segala bentuk kebijakan yang di ambil oleh Sultan. Jika menilik kebelakang sejarah kepemimpinan Sultan-Sultan terdahulu yang bersikap nonkooperatif dengan pihak Belanda, kepemimpinannya tidak akan lama bertahan pada tahta pemerintahannya. Belanda melakukan Intimidasi terhadap Sultan Bulungan melalui perjanjian-perjanjian yang ditandatangani pada sebuah kontrak politik. Intimidasi pihak kolonialisme Belanda juga dapat di lihat dari kesewenang-wenangan Belanda terhadap keputusan yang akan diambil Sultan. Salah satunya tentang pungutan pajak pada era kepemimpinan Sultan Azimuddin dan Kasimuddin. Secara politik dapat dilihat karena ikut campurnya pihak Kolonial Belanda pengaruh Sultan dibuat berkurang kewenangannya secara bertahap hingga tidak lagi berkuasa secara penuh di pemerintahan melainkan hanya pada rakyat dan adat istiadat saja. Hingga pada era diproklamirkannya Kemerdekaan Bangsa Indonesia saat dimana Kesultanan Bulungan harus menentukan sikap. Segala bentuk kolonialisme tidak dikehendaki lagi masuk dalam tubuh pemerintahan Kesultanan Bulungan.

Kondisi demikianlah yang mempengaruhi sikap Sultan Djalaluddin terhadap pihak Belanda. Oleh sebab itu Kesultanan Bulungan menentukan sikap berpihak pada pemerintahan Republik Indonesia. Kelayalitan serta keberpihakan Kesultanan Bulungan pada pihak Republik Indonesia dibuktikan dengan dukungan Sultan pada pemerintah Republik Indonesia yang pada masa itu berpusat di Yogyakarta. Ada dua alasan mengapa Kesultanan Bulungan memilih berpihak kepada pemerintah Republik Indonesia. *Pertama* sikap kesewenangan Belanda yang mengintimidasi segala kebijakan yang diambil oleh Sultan Bulungan. *Kedua* komitmen Sultan yang tidak ingin lagi adanya segala bentuk tidak kolonialisme di wilayah pemerintahan Kesultanan Bulungan. Dari alasan tersebut dapat mengambil kesimpulan bahwa Kesultanan Bulungan ingin bergabung dengan pemerintahan yang sah yaitu, Republik Indonesia.

Sikap dukungan tersebut ditunjukkan melalui pidato yang disampaikan utusan Kesultanan Bulungan

yakni Datu Bendahara Paduka Raja dalam forum Konferensi Malino yang intinya dijelaskan bahwa kesultanan Bulungan yang di wakili oleh Datu Bendahara Paduka Raja sangat mendukung pemerintah pusat dengan mengapresiasi dengan segala bentuk kebijakan PM. Sjahir tentang keutuhan negara RI disisi lain Kesultanan Bulungan juga menyetujui sikap Nadjamudin Salebes Selatan yang mengutuk segala bentuk tindakan intervensi yang merugikan permusyawaratan Belanda dan Indonesia. Selain itu kelayalitan kesultanan Bulungan dibuktikan dengan sebuah peristiwa upacara pengerekan bendera merah-putih di halaman Istana Kesultanan Bulungan pada tanggal 17 Agustus 1949.

Prosesi Pengerakan Bendera Merah-Putih dilaksanakan Pada tanggal 17 Agustus 1949, pukul 07.00 WITA, Sultan Muhammad Djalaluddin yang menjadi pemimpin upacara penggerekan Bendera Merah-Putih pertama kalinya di halaman istana kerajaan menjadi bukti kelayalitan Kesultanan Bulungan terhadap Republik Indonesia. Bertindak sebagai penaik bendera merah putih pada saat itu adalah Pejabat Kiai (Asisten Wedana) di Tanjung Palas, P. J. Pelupessi, sahabat Sultan Djalaluddin. Sebagai tamu undangan turut juga hadir Controleur NICA di Tanjung Selor yaitu J.H.D. Linhoud. Dalam kesempatan yang sama, ketua Dewan Rakyat Kesultanan Bulungan yakni Abdur Rasjid yang mewakili seluruh Rakyat kesultanan Bulungan menyampaikan pidato selamat pada hari bersejarah tanggal 17 agustus 1949 tentang dukungan segenap seluruh masyarakat Kesultanan Bulungan berdiri dan berpihak kepada Republik Indonesia. Sikap Sultan dan segenap rakyat Kesultanan Bulungan menjadi bukti kecintaan mereka terhadap Republik Indonesia dimana peristiwa prosesi upacara penaikan bendera Merah Putih tersebut jauh terjadi sebelum diresmikannya pemerintahan Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949.

#### Gambar

#### Prosesi Upacara Penaikan Bendera Merah Putih di Depan Istana Kesultanan Bulungan (17 Agustus 1949)



Sumber: <http://www.zarkasyi.id/>, Diakses 1 November 2016, Pukul 16.40 WIB

<sup>11</sup>Panembahan Maharaja Pandita adalah Raja dari kerajaan Tidung yang dinobatkan pada tahun 1853.

#### e. Strategi Politik Sultan 1945-1950

Wilayah Bulungan yang merupakan suatu *kerajaan* yang berada di pulau Kalimantan bagian utara ini sangat jauh berbeda kondisi perpolitikannya seperti di tanah Jawa. Hal tersebut dapat dimengerti sebab suhu perpolitikan di tanah air yang baru saja merdeka belum sepenuhnya stabil roda pemerintahannya. Seperti halnya penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda oleh para pemimpin Republik Indonesia yang mengguakan jalur politik diplomasi untuk menyelesaikan permasalahan kedua negara. Hal yang sama juga ditempuh oleh Sultan Djalaluddin, masa itu bukanlah suatu yang mudah menghadapi Sekutu dan NICA. Tidak ada perlawanan kontak senjata yang oleh dilakukan rakyat, Sultan lebih memilih menyelesaikan konflik dengan jalur diplomasi guna menghindari kontak fisik yang nantinya tentu saja akan menelan korban jiwa.

**Gambar**  
**Sultan Djalaluddin Menerima penganugrahan**  
**Alasuite (Oktober 1947)**



Sumber : <http://media-kitlv.nl/> di akses pada tanggal 19 Desember 2016, Pukul 18.50 WIB.

Politik Diplomasi yang ditempuh oleh Sultan Djalaluddin sebagai salah satu jalan untuk menghindari kekerasan dan peperangan. Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 serangkaian pertemuan yang diadakan baik dari pihak Belanda maupun Republik Indonesia Kesultanan Bulungan selalu sedia mengirimkan delegasinya. Selain itu Sultan Bulungan mengambil satu langkah politik yakni Politik Bermuka Dua pada pihak yang bersengketa yakni Indonesia dan Belanda. Politik Bermuka Dua ialah politik yang berupa siasat dengan memperlihatkan sifat tidak jujur karena ingin mendapatkan keuntungan dari dua belah pihak yang sedang bersengketa. Siasat politik ini ditunjukkan untuk

meraih simpati dari kedua belah pihak sekaligus mendapatkan keuntungan dari keduanya.<sup>12</sup>

Bukti Politik Bermuka Dua yang digunakan oleh sultan dapat dilihat dari kebijakan kebijakan yang diambilnya, Bukti konkrit tersebut dapat dilihat pada beberapa peristiwa. *Pertama* Sultan Djalaluddin mendapat anugrah gelar kehormatan berupa Letnan Kolonel Tituler (Letkol Kehormatan) dari Ratu Wihelmina (1890-1948) yang kemudian di tindak lanjuti dengan upacara Birau selama 40 hari 40 malam pada tahun 1947. Peristiwa tersebut bukan hanya Belanda saja yang terkecoh namun pemerintah Indonesia juga sempat tidak menyadari bahwa saat itu Kesultanan Bulungan dan rakyatnya berada di pihak Republik Indonesia. *Kedua* Sultan selalu mengirimkan Datu Bendahara Paduka Raja dalam setiap pertemuan yang digagas oleh Belanda hal ini juga tentunya untuk meredam anggapan pihak Belanda tentang keberpihakan Sultan Djalaluddin kepada RI. Hal ini dapat dilihat saat pertemuan yang digagas oleh Van Mook di Denpasar, utusan Kesultanan Bulungan sekaligus juga membawakan mandat kepada pihak Republik Indonesia atas sikap yang mereka ambil yakni Kesultanan Bulungan bertekad mendukung Republik Indonesia secara penuh. Selain itu Sultan ternyata sangat aktif menggalang dukungan terhadap Republik melalui serangkaian pertemuan secara rahasia yang dilakukan oleh utusan beliau Datuk Bendahara Paduka Raja kepada Sultan Gunung Tabur dan Sultan Sambaliung untuk mendukung penuh Republik Indonesia bersama rakyat Kesultanan Bulungan, lebih jauh dukungan secara terbuka diberikan oleh Kesultanan Bulungan terhadap Sutan Syahrir yang kala itu menjabat Duta Besar Keliling *Ketiga* berdirinya cabang Perkumpulan pro republik INI di wilayah Kesultanan Bulungan yakni di Tarakan dan Tanjung Selor, dapat dilihat jika Sultan Bulungan yang pada masa itu tidak berpihak kepada Republik Indonesia bisa saja dengan mudah Sultan meredam aksi pihak yang pro Republik tersebut, Sultan lebih memilih sikap terkesan membiarkan bahkan melindungi kader-kader partai pro Republik yang bergerak melakukan perlawanan politik terhadap pemerintah Belanda, keberadaan perkumpulan Ikatan Nasional Indonesia (INI) di Bulungan.

#### PENUTUP

##### a. Kesimpulan

Kesultanan Bulungan menentukan sikap berpihak pada pemerintahan Republik Indonesia.

<sup>12</sup> Deni Kurniawan As'ari, Kamus istilah politik dan kewarganegaraan, (Universitas Michigan: Yrama Widya), 2006, hlm.172.



Keloyalitasan serta keberpihakan Kesultanan Bulungan pada pihak Republik Indonesia dibuktikan dengan dukungan Sultan pada pemerintah Republik Indonesia yang pada masa itu berpusat di Yogyakarta. Ada dua alasan mengapa Kesultanan Bulungan memilih berpihak kepada pemerintah Republik Indonesia. *Pertama* sikap kesewenangan Belanda yang mengintimidasi segala kebijakan yang diambil oleh Sultan Bulungan. *Kedua* komitmen Sultan yang tidak ingin lagi adanya segala bentuk tidak kolonialisme di wilayah pemerintahan Kesultanan Bulungan. Dari alasan tersebut dapat mengambil kesimpulan bahwa Kesultanan Bulungan ingin bergabung dengan pemerintahan yang sah yaitu, Republik Indonesia. Selain itu kelayaklaksanaan kesultanan Bulungan dibuktikan dengan sebuah peristiwa upacara pengerekan bendera merah-putih di halaman Istana Kesultanan Bulungan pada tanggal 17 Agustus 1949. Pengerakan Bendera Merah-Putih dilaksanakan Pada tanggal 17 Agustus 1949, pukul 07.00 WITA, Sultan Muhammad Djalaluddin yang menjadi pemimpin upacara pengerekan Bendera Merah-Putih pertama kalinya di halaman istana kerajaan. Sikap Sultan dan segenap rakyat Kesultanan Bulungan menjadi bukti kecintaan mereka terhadap Republik Indonesia dimana peristiwa tersebut jauh terjadi sebelum diresmikannya pemerintahan Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 dan kembali ke negara Kesatuan Republik Indonesia.

Situasi politik yang terjadi di Kalimantan Timur yang demikianlah membuat Sultan Djalaluddin dengan segera mungkin harus mengambil langkah politiknya. Mengambi kebijakan langkah politik guna menyelesaikan sengketa dan menentukan sikap berpihak kepada pihak yang dinilai benar, yakni dengan Politik diplomasi dan Politik Bermuka Dua. Politik Diplomasi yang ditempuh oleh Sultan Djalaluddin sebagai salah satu jalan untuk menghindari kekerasan dan peperangan. Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 serangkaian pertemuan yang diadakan baik dari pihak Belanda maupun Republik Indonesia Kesultanan Bulungan selalu sedia mengirimkan delegasinya. Selain politik diplomasi Sultan juga menggunakan Politik Bermuka Dua. Politik bermuka dua, ialah politik yang berupa siasat dengan memperlihatkan sifat tidak jujur karena ingin mendapatkan keuntungan dari dua belah pihak yang sedang bersengketa. Siasat politik ini ditunjukkan untuk meraih simpati dari kedua belah pihak sekaligus mendapatkan keuntungan dari keduanya.<sup>13</sup>

<sup>13</sup>Deni Kurniawan As'ari, Kamus istilah politik dan kewarganegaraan, (Universitas Michigan: Yrama Widya), 2006, hlm. 172.

Bukti Politik Bermuka Dua yang digunakan oleh sultan dapat dilihat dari kebijakan kebijakan yang diambilnya, Bukti konkrit tersebut dapat dilihat pada beberapa peristiwa. *Pertama* Sultan Djalaluddin mendapat anugrah gelar kehormatan berupa Letnan Kolonel Tituler (Letkol Kehormatan) dari Ratu Wihelmina (1890-1948) yang kemudian di tindak lanjuti dengan upacara Birau selama 40 hari 40 malam pada tahun 1947. Peristiwa tersebut bukan hanya Belanda saja yang terkecoh namun pemerintah Indonesia juga sempat tidak menyadari bahwa saat itu Kesultanan Bulungan dan rakyatnya berada di pihak Republik Indonesia. *Kedua* Sultan selalu mengirimkan Datu Bendahara Paduka Raja dalam setiap pertemuan yang digagas oleh Belanda hal ini juga tentunya untuk meredam anggapan pihak Belanda tentang keberpihakan Sultan Djalaluddin kepada RI. Hal ini dapat dilihat saat pertemuan yang digagas oleh Van Mook di Denpasar, utusan Kesultanan Bulungan sekaligus juga membawakan mandat kepada pihak Republik Indonesia atas sikap yang mereka ambil yakni Kesultanan Bulungan bertekad mendukung Republik Indonesia secara penuh. Selain itu Sultan ternyata sangat aktif menggalang dukungan terhadap Republik melalui serangkaian pertemuan secara rahasia yang dilakukan oleh utusan beliau Datuk Bendahara Paduka Raja kepada Sultan Gunung Tabur dan Sultan Sambaliung untuk mendukung penuh Republik Indonesia bersama rakyat Kesultanan Bulungan, lebih jauh dukungan secara terbuka diberikan oleh Kesultanan Bulungan terhadap Sutan Syahrir yang kala itu menjabat Duta Besar Keliling. *Ketiga* berdirinya cabang perkumpulan pro republik INI di wilayah Kesultanan Bulungan yakni di Tarakan dan Tanjung Selor, dapat dilihat jika Sultan Bulungan yang pada masa itu tidak berpihak kepada Republik Indonesia bisa saja dengan mudah Sultan meredam aksi pihak yang pro Republik tersebut, Sultan lebih memilih sikap terkesan membiarkan bahkan melindungi kader-kader partai pro Republik yang bergerak melakukan perlawanan politik terhadap pemerintah Belanda, keberadaan perkumpulan Ikatan Nasional Indonesia (INI) di Bulungan.

Mendukung RI secara terbuka bukanlah hal yang mudah, langkah yang di ambil oleh Sultan harus melalui berbagai pertimbangan yang matang dalam mengambil strategi kebijakan politik pada siapa Kesultanan Bulungan harus berpihak. Kesultanan Bulungan mengambil langkah politik Diplomasi dan politik Bermuka Dua bukan tanpa alasan, situasi dan kondisi pada masa itu menyebabkan Sultan harus dengan segera mengambil langkah politik yang demikian. Penguasaan wilayah Kesultanan Bulungan oleh tentara sekutu sejak 1 Juni 1945 segala bentuk keamanan baik sipil maupun militer dengan segera di ambil alih oleh

tentara Sekutu dengan seluruh kekuatannya. Hal demikianlah menyebabkan Sultan mengambil langkah politik Diplomasi dan Bermuka Dua. Dapat dilihat dari pembagian tugas yang rapi dimana ditingkat elit, Sultan Djalaluddin dan Datuk Paduka Radja berhasil melakukan lobi politik pada penguasa Kesultanan Sembaliung dan Gunung Tabur untuk mendukung sepenuhnya Republik Indonesia, sedang dilapisan bawah, Abdur Rasjid dan kelompoknya yang tergabung dalam Dewan Rakjat Kesultanan Bulungan melakukan lobi politik untuk meyakini rakyat bergabung sepenuhnya dibelakang Republik. Strategi Politik Bermuka Dua Sultan nyatanya berhasil membawa Kesultanan Bulungan kepada pihak yang seharusnya ia memberi dukungan, yakni berpihak kepada Republik Indonesia. Karena Kesultanan Bulungan bertekad tidak akan lagi menerima tindakan kolonialisme diwilayah pemerintahannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

Besluit No. 4 tanggal 23 Oktober 1909

Missive Gourvenements Secretaris No.2766 tanggal 23 Oktober 1909.

### Koran

Pelita Rakjat "Permoesjawaratan Di Malino" 18 Juli 1946.

\_\_\_\_\_, "Semangat Kebangsaan Melipoti Malino" 22 Juli 1946.

\_\_\_\_\_, "Moedjamar Malino" 23 Juli 1946.

\_\_\_\_\_, "Indonesia Akan Dibagi Menjadi 4 Negara" 24 Juli 1946.

\_\_\_\_\_, "Konperensi I.N.I Di Samarinda" 8 April 1948

### Buku

A.H Nasution. 1977. *Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid I*. Bandung: Angkasa.

Aminudin Kasdi. 2001. *Memahami Sejarah*. Surabaya : University Press.

Akbarsyah. 1997. *Kemasan Atraksi Seni Budaya Daerah Tingkat II Bulungan*. Jakarta: PT. Tempriint

Ba'im. 1996. *Terbentuk dan Runtuhnya Negara RIS 1945-1950*. Universitas Indonesia: Tidak Diterbitkan.

Deni Kurniawan As'ari. 2006. *Kamus Istilah Politik Dan kewarganegaraan*. Universitas Michigan: Yrama Widya

Depdikbud. 1976. *Monografi Kalimantan Timur, Jilid II*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Depdikbud. 1981. *Sejarah Daerah DI Yogyakarta*. Jakarta : Depdikbud.

George McT Kahin. 1995. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia* (terj. Nin Bakdi, Sumanto). Surakarta-Jakarta : UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan.

H.A. Moeis Hassan. 1994. *Ikut Mengukir Sejarah*. Bandung : Yayasan Bina Ruhui Rahayu

HS. Ali Amin Bilfaqih. S. 2006. *Sekilas Sejarah Kesultanan Bulungan Dari Masa ke Masa*. Tarakan: CV Eka Jaya Mandiri

Ida Anak Agung Gde Agung. 1985. *Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Ida Anak Agung Gde Agung. 1995. *Persetujuan Linggajati*. Surakarta: Yayasan Pustaka Nusantara dan Sebelas Maret University Press

LKBN Antara dan Pemda Dati II Bulungan. 1995. *Pesona Dan Tantangan Bulungan*. Jakarta :

M.Said Karim. 2011. *Mutiara Abadi (Restruksi Historis Pejuang-Pejuang Kemerdekaan Bulungan)*. Bulungan: Pemda Kabupaten Bulungan.

Panitia Sejarah Pemerintah Kabupaten Bulungan. 1992. *Sejarah Pemerintah Di Kabupaten Bulungan Dari Masa Ke Masa: Bidang Pemerintahan* (Tidak diterbitkan).

Pemda Bulungan. 1997. *Birau di Tanjung Selor, Kemasan Atraksi Seni-budaya Daerah Tingkat II Bulungan dalam Erah BIMP-EAGA*. Bulungan,: Secretariat Wilayah Daerah.

Pemda Dati II Bulungan dan LKBN Antara. 1995. *Pesona dan Tantangan Bulungan*. Jakarta : Pemda Tingkat II Bulungan.

Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. 1978. *Sejarah Daerah Kalimantan Timur*. Jakarta: Depdikbud.

Robert Van Niel. 1960. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya

Said Karim. 2011. *Mutiara Abadi (Restruksi Historis Pejuang-Pejuang Kemerdekaan Bulungan)*. Tanjung Selor: Pemkab Bulungan.

Suparwoto dan Sugiarti. 1997. *Sejarah Indonesia Baru*. Surabaya: University Press IKIP Surabaya.

Sri Handayani. 2004. *Sejarah Perkembangan Pendidikan Di Bulungan Kalimantan Timur Tahun 1908-1942*. Universitas Negeri Surabaya: Tidak Diterbitkan.



- The Liang Gie. 1993. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia Jil.1*. Yogyakarta: Liberty.
- Takafusa Nakamura.1985. *Perkembangan Ekonomi Jepang Modern*.Kementerian Luar Negeri Jepang.

#### Sumber dari akses Internet

- Prof. Helius Sjamsuddin, Ph.D.,MA Dr.Hj.Enok Maryani,MS*Kalimantan Dalam Masa Revolusi Indonesia (Tarik Ulur Antara Unitarisme danFederalisme)1945-1950*,  
(online)([http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.PEND.GEOGRAFI/196001211985032-ENOK\\_MARYANI/Kalimantan.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.PEND.GEOGRAFI/196001211985032-ENOK_MARYANI/Kalimantan.pdf))di akses tanggal 21 Oktober 2016).
- RizqieNovita Sari.2014.*DinamikaBadanPermusyawaratan Federal (BFO) MenujuKedaulatan Indonesia*, (Online)  
([file:///C:/Users/grassfm%20bulungan/Documents/8398-11283-1-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/grassfm%20bulungan/Documents/8398-11283-1-PB%20(2).pdf)) diakses tanggal 20 Oktober 2016).
- MartinusNanang. *SejarahPenyebaran Dan KebudayaanSukuBulungan di KabupatenMalinau*, (online),  
([https://www.academia.edu/1320521/Sejarah Penyebaran dan Kebudayaan Suku Bulungan di Kabupaten Malinau](https://www.academia.edu/1320521/Sejarah_Penyebaran_dan_Kebudayaan_Suku_Bulungan_di_Kabupaten_Malinau))diakses tanggal 30 Oktober 2016
- Sejarah Mata air Umbulan,  
(online)<http://www.wartabromo.com/2015/03/26/menyingkap-sejarah-mata-air-umbulan/> diakses 30 juni 2016, pukul 20.15 WIB.
- Yulida Yosika Sihotang. (2012). *Sejarah Berdirinya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Kota Medan. : Unimed*, (online)  
<http://library.unimed.ac.id/default.aspx?tabID=622&src=k&id=162443&rsrc=/default.aspx?tabID=0&kt=Minum+air>), diakses 2 April 2016, 17.30 WIB.

Universitas Negeri Surabaya